

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu negara khususnya di Indonesia terdapat asas sentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah. Pada system otonomi daerah terdapat Kepala pemerintah daerah yang harus mengambil keputusan untuk melakukan perubahan urusan daerah nya masing-masing. Salah satunya Dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan, pemerintah daerah mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan negara dan negara. Pemerintah diciptakan untuk melakukan hal-hal publik sehingga lembaga-lembaga pemerintah tidak keluar untuk mencari uang. Tujuan utama suatu pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaikinya di masa depan. Peningkatan layanan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial daerah, termasuk sektor riil, keuangan, dan infrastruktur, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Dengan mengelola potensi daerahnya, misalnya dengan meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, pemerintah daerah juga meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945.

Otonomi daerah (otda) adalah kewenangan daerah otonom yang bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan, seperti perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Padahal, pertimbangan utama pembentukan otonomi daerah adalah evolusi negara yang menunjukkan bahwa masyarakat mendambakan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Selain itu, berbagai keadaan eksternal menunjukkan bahwa globalisasi semakin meluas sehingga memerlukan daya saing setiap bangsa dan pemerintahan daerah. Melalui program otonomi daerah, tujuan tersebut akan dicapai dengan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah.

Program otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan ciri khas masing-masing daerah. Aspek otonomi daerah ini dapat dibangun dengan pengelolaan anggaran dana desa yang baik seperti memperhatikan peran penting berikut ini (1) Kapasitas keuangan daerah yang artinya daerah harus mempunyai kewenangan dan kesanggupan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Kemudian (2) Agar pendapatan daerah menjadi bagian terbesar dari sumber daya keuangan, ketergantungan pada bantuan pemerintah harus diminimalkan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting.

Melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisis laporan pemerintah berupa laporan tan dan pengeluaran daerah. Mengingat anggaran pemerintah merupakan tulang punggung

penyelenggaraan pemerintahan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) LRA merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang penting. Dalam evaluasi kinerja, dimungkinkan untuk menjaga stabilitas, distribusi dan publisitas jangka panjang serta mengatur organisasi secara terus menerus. Suatu daerah dikatakan maju apabila mampu akuntabel kepada masyarakat, transparan dalam pengelolaan dana, dan baik dalam mencapai *value for money* dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas, transparansi, dan nilai uang. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

(Jennings, 2000) menyebutkan ciri-ciri umum dari masing-masing laporan yang biasanya tercantum dalam kinerja anggaran desa seperti : (1) Laporan Laba Rugi, (2) Laporan Arus Kas, (3) Laporan Perubahan Modal, (4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil sistem akuntan yang berguna dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan mengambil keputusan dengan menggunakan informasi keuangan sebagai dasarnya. Laporan keuangan harus dicatat sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan juga bergantung pada sifat keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyampaian informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja organisasi.

Tujuan dari informasi keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap sumber-sumber yang dipercayakan kepadanya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menilai keberhasilannya atau belum. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya berguna sebagai penilaian, namun karena tidak semua orang memahami akuntansi dengan baik, maka analisis laporan keuangan

juga digunakan untuk membantu memahami dan menafsirkan laporan keuangan pemerintah daerah. Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. Dana ini berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan harus mencakup paling sedikit 10% dari APBN. Setiap inisiatif yang menggunakan dana desa harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas. Semua laporan tentang bagaimana dana desa digunakan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menetapkan beberapa prioritas untuk pemanfaatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Membantu masalah ekonomi desa adalah prioritas utama. Dana tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk digunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia desa melalui pembinaan dan pendampingan yang lebih baik. Dengan adanya dana desa, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa akan ditingkatkan.

Dana desa yang dapat membangun pembangunan daerah salah satunya dilihat dari anggaran belanja desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat di suatu desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) merupakan anggaran yang dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Studi telah menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa. Oleh karena itu, APBDes harus dilaksanakan seoptimal mungkin dan didukung oleh kemampuan sumber daya masyarakat yang mengelolanya. TIK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pelaksanaan APBDes. TIK dapat digunakan selama proses penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan oleh pimpinan pemerintahan desa dan masyarakat serta unsur-unsur terkait lainnya.

Implementasi pada anggaran desa Cibiru Wetan masih belum optimal dikarenakan melambungnya peningkatan angka realisasi anggaran belanja desa, salah satunya di desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dari tahun 2020-2022. Berikut data realisasi anggaran belanja desa cibiru wetan :

Tabel 1. 1Rekapitulasi Data Realisasi Anggaran Belanja Desa Cibiru Wetan 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Persentase
2020	2.474.361.250,00	99,85%
2021	2.870.327.700,00	99,86%
2022	3.176.664.800,00	99,90%

Sumber : Web Desa Cibiru Wetan (2023)

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa Optimalisasi realisasi anggaran desa cibiru wetan dari tahun ke tahun belum optimal. Berikut beberapa indikator yang menjadi permasalahan :

Tabel 1. 2 Indikator Permasalahan Penelitian

Anggaran	Indikator Permasalahan
Rp 3.176.664.800,00	Meskipun anggaran realisasi belanja desa di tahun 2022 meningkat, namun tidak sejalan dengan Meningkatnya program pemerintah desa sehingga memerlukan anggaran yang seimbang dan dapat mengcover segala aktivitas
Rp 1.053.559.000,00	Jika dilihat pendapatan Alokasi Dana Desa di tahun 2022 ini masih di angka Rp 1.053.559.000,00, sementara jika dilihat dengan realisasi anggaran alokasi dana desa cibiru wetan di tahun 2022 sebesar Rp 3.176.664.800,00 sehingga dapat dikatakan tidak seimbang.

Sumber : Data Primer diolah peneliti (2023)

Berdasarkan indikator permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di cibiru wetan belum optimal. Terdapat perbedaan antara data keduanya salah satunya dilihat dari pendapatan Alokasi Dana Desa di tahun 2022 ini masih di angka Rp 1.053.559.000,00, sementara jika dilihat dengan realisasi anggaran alokasi dana desa cibitu wetan di tahun 2022 sebesar Rp 3.176.664.800,00 sehingga dapat dikatakan tidak seimbang. Selain itu pada aspek anggaran belanja desa memang meningkat dari 3 tahun sebelumnya namun tidak sejalan dengan hasil persentase pada akhir realisasi anggaran, Oleh karena itu dengan menganalisis permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mencoba mengkorelasikan antara data primer dengan wawancara secara langsung terhadap sejumlah responden di desa cibiru wetan. Tentunya dalam penelitian ini menggunakan teori Portofolio. Teori portofolio ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1958 dan menjadi besar dalam pengelolaan portofolio.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dengan demikian peneliti ingin mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Optimalisasi Anggaran Belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis akan memaparkan terkait pembahasan penelitian dengan mengidentifikasi masalah dalam penerapan memanifestasi anggaran pendapatan dan belanja desa secara optimal di desa cibiru wetan. Masalah yang mungkin akan dipaparkan yaitu meliputi:

- a) Keuangan masih mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak konsisten.
- b) Pemerintah daerah masih belum mampu mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

- c) Untuk memenuhi kebutuhan daerah, pemerintah desa selalu bergantung pada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat ditinjau dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan daerah.
- d) Tuntutan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah desa harus dipenuhi guna meningkatkan kinerja keuangan, karena sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mempunyai kinerja keuangan yang buruk.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban keuangannya. Oleh karena itu, berdasarkan konteks dan identifikasi masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat demokratis pada kelompok masyarakat anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
- b. Bagaimana tingkat keadilan anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
- c. Bagaimana tingkat transparansi anggaran belanja Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
- d. Bagaimana moral dalam pengelolaan anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
- e. Bagaimana tingkat aspek kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
- f. Bagaimana tingkat akuntabilitas anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui tingkat optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja desa saat ini, serta untuk mengetahui

Tingkat optimalisasi dalam pelaksanaan anggaran belanja desa di cibiru wetan. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat demokratis pada Kelompok masyarakat anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat keadilan anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat transparansi anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- d. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan moral dalam pengelolaan anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?;
- e. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat aspek kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- f. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat akuntabilitas anggaran belanja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan hasil positif sebagai dasar aksiologi dalam ruang lingkup pemikiran administrasi publik.

a. Manfaat secara Teoretis

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi Publik khususnya terkait dengan optimalisasi anggaran belanja desa. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk generasi masa yang akan datang serta dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan maupun referensi terhadap suatu penelitian.

b. Manfaat secara Praktis

- a) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran terhadap tingkat kinerja keuangan Daerah Desa Cibiru Wetan

Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah termotivasi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya di tahun-tahun mendatang.

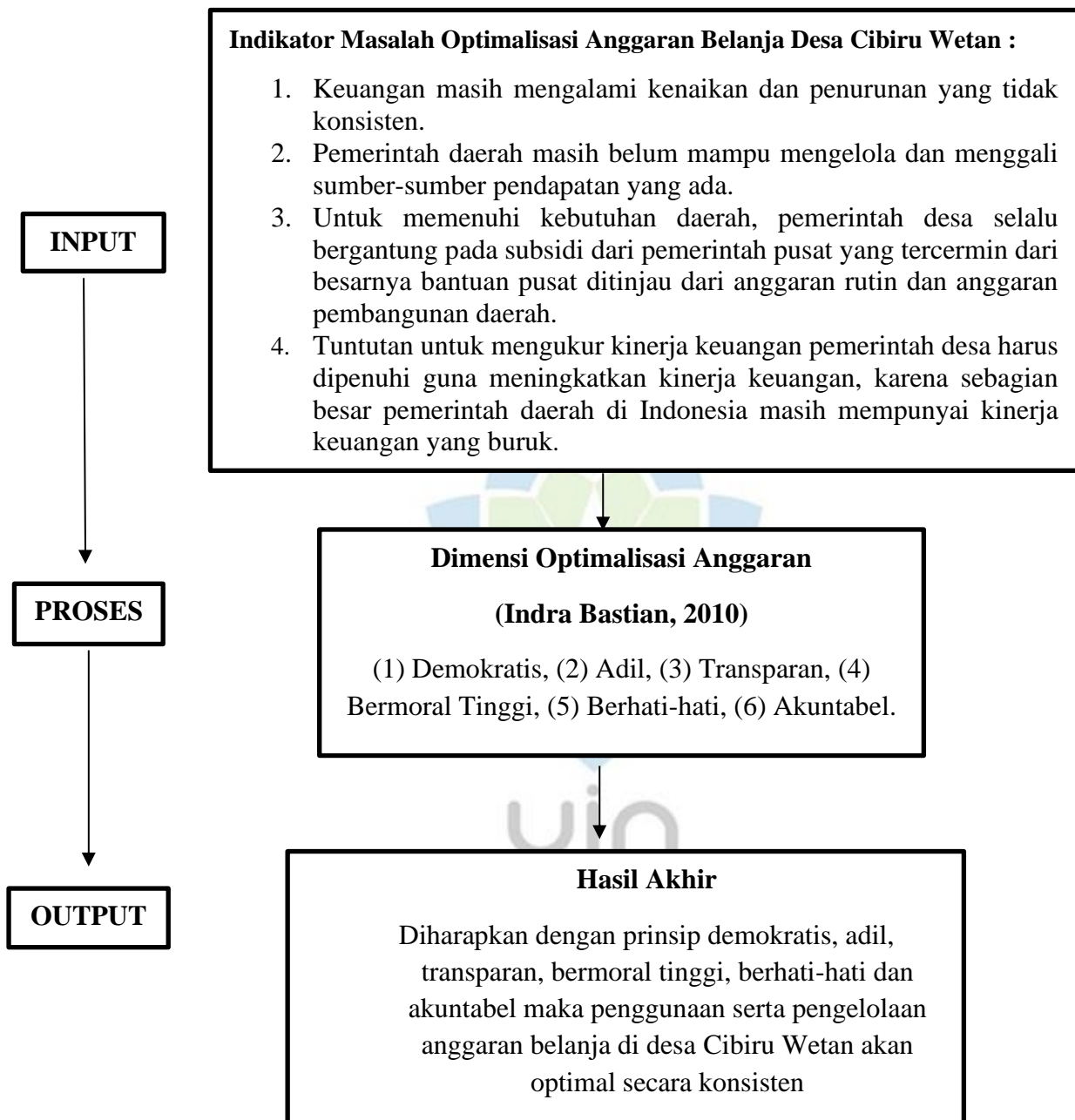
- b) Mengenai masyarakat Masyarakat memerlukan informasi yang jelas mengenai laporan pertanggungjawaban APBD dari pemerintah desa Cibiru Wetan.
- c) Para ahli berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada pengayaan literatur yang ada dan menjadi referensi untuk penelitian masa depan mengenai keuangan dalam kurikulum administrasi publik.

1.6 Kerangka Berpikir

Menurut Hussey dan Hussey dalam silalahi, (2015) bahwa kerangka berpikir *“a theoretical framework is a collection of theories and models from the literature which underpins a positivistic research study. The theoretical framework is a fundamental part of this type of research as it explains the research questions or hypotheses”*

Sebuah instansi pemerintahan diperlukan adanya optimalisasi anggaran yang baik agar terselenggaranya kesejahteraan masyarakat sekitar. optimalisasi anggaran belanja desa juga memerlukan kolaborasi berbagai peran dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan (kaur), memainkan peran sentral dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan anggaran.

Mengawasi penggunaan anggaran diperlukan adanya beberapa prinsip yang harus diimplementasikan seperti (1) Demokratis, (2) Adil, (3) Transparan, (4) Bermoral Tinggi, (5) Berhati-hati, (6) Akuntabel. Faktor yang dapat mempengaruhi penelitian ini ialah konsistensi pengelolaan anggaran belanja dana desa agar terciptanya optimalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan prinsip demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati dan akuntabel maka penggunaan serta pengelolaan anggaran belanja di desa Cibiru Wetan akan optimal secara konsisten.



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

Sumber : Sumber : Herny (Mufiz, 2016),
Mahesa (Rafli, 2022) dan Indra Bastian,
2010

Diolah Peneliti, 2024